

## PERAN SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM MENANGGULANGI TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL

Abdain<sup>1</sup>

**Abstrak:** Jurnal ini membahas tentang *Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial*. Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana aplikasi konsep ekonomi Islam dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ekonomi Islam dalam menanggulangi terjadinya kesenjangan sosial. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah Pendekatan syar'i, dan pendekatan sosiologi. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode *library research*, yaitu suatu upaya mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dengan membaca buku-buku dan karya-karya ilmiah yang relevan termasuk tulisan yang dipublikasikan di berbagai media cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori ekonomi Islam mampu memberikan alternatif terhadap krisis ekonomi yang telah terbukti membawa efek kesenjangan sosial bagi setiap individual (Faham kapitalisme dan sosialisme). Sistem ekonomi Islam mampu memberikan nilai dan perilaku serta moral dan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dengan tidak melihat perbedaan dalam klasifikasi kehidupan masyarakat. Peran ekonomi Islam dalam menanggulangi tingkat kesenjangan sosial yaitu bahwa semua manusia yang hidup dalam masyarakat dituntut untuk bekerja (berusaha) memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki, kemudian pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus diperbaiki sehingga bisa tersalurkan secara adil, Pengentasan masalah kemiskinan dapat diminimalisir dengan campur tangan pemerintah.

**Kata Kunci:** Peran, Ekonomi Islam, Kesenjangan, Sosial

### Pendahuluan

Masalah ekonomi merupakan masalah muamalah dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya sebuah kegiatan ekonomi, keadaan masyarakat tidak akan berkembang, apalagi di era globalisasi. Jika mengacu pada negara yang didirikan oleh Rasulullah, ketika itu terdapat orang-orang yang tidak menganut agama Islam (orang kafir), tetapi mereka merasa nyaman dan tenang di bawah naungan kepemimpinan yang diatur dalam Islam. Transparansi pemerintah dalam membuat kebijakan dan pemerataan pendapat adalah perlu. Pada masa tersebut dana zakat merupakan dana yang efektif untuk pengentasan dan pengurangan kesenjangan sosial atau pembeda antara orang kaya dan miskin. Pada masa Rasulullah dan keempat khalifah Islam pendistribusian dana zakat yang transparan, langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana zakat tersebut, dan orang-orang yang bukan muslim pada masa Rasulullah dan para sahabat wajib membayar jizyah (pajak).

Perkembangan ekonomi Islam dalam tataran praktis maupun akademis sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari data statistik perbankan syari'ah yang dikeluarkan tiap bulannya oleh bank Indonesia, juga penelitian di bidang perbankan syari'ah, mulai dari soal faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syari'ah, bidang investasi syari'ah, hingga soal model pemberdayaan dana zakat di Indonesia. Oleh sebab itu ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan dalam masyarakat. Oleh sebab itu ekonomi dalam kacamata Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini, tetapi sebagai pelengkap kehidupan dan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, serta menjadi penunjang bagi pelayanan aqidah dan misi yang diemban.<sup>2</sup>

Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang Muslim kepada Allah swt., hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan

---

<sup>1</sup> Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet.1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 3.

azas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.<sup>3</sup>

Sistem Ekonomi yang seimbang seharusnya menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat saja. Hal ini disebabkan karena masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam membangun ekonominya termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tulisan ini akan mengkaji tentang peran sistem ekonomi Islam dalam menanggulangi kesenjangan sosial.

### **Konsep Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam merupakan teori ekonomi yang bersentuhan dengan nilai-nilai transendental yang terdapat dalam ajaran Islam, dan hal ini tidak terlepas dari dua pedoman pegangan umat Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi saw dan ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan konteksnya. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang bersifat integral dan tidak terpisahkan dengan ajaran Islam secara keseluruhan maupun dengan realitas kehidupan. Ilmu Ekonomi Islam lebih terbatas daripada ilmu ekonomi modern. Terbatas karena hanya mengenai orang-orang yang mempunyai keyakinan pada ke-Esa-an Allah dan ajaran-ajaran moralnya, sebagaimana tercermin dalam kitab al-Qur'an dan Sunnah. Juga terbatas karena suatu Negara Islam tidak bisa mendorong setiap hal termasuk ekonomi karena dalam suatu Negara Islam kegiatan-kegiatan yang tidak meningkatkan kesejahteraan manusia tidak dapat didorong, namun konsep kesejahteraan manusia itu tidak statis, dan selalu relatif pada keadaan yang berubah. Ada tiga sasaran yang ingin diwujudkan oleh sistem Ekonomi Islam yakni, (1) merealisasikan pertumbuhan ekonomi; (2) mewujudkan kesejahteraan manusia; dan (3) mengurangi perbedaan pendapatan dan pemerataan kekayaan.<sup>4</sup>

Landasan (prinsip-prinsip) ekonomi Islam setidaknya-tidaknya terdiri atas empat komponen yakni: tauhid, adil, khilafah dan tazkiyah.

#### **1. Prinsip Kesatuan (Tauhid)**

Tauhid bermakna kemahaesaan Allah swt sebagai pencipta, pemilik semua yang ada di bumi dan di langit, pemberi rezeki secara adil, yang berkuasa atas segala sesuatu. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta secara sadar diciptakan oleh Allah swt, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya (QS: Ali' Imran(3): 190; QS: Al-Mu'minuun (23): 15; QS: Shaad (38): 27).<sup>5</sup> Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Oleh karena itu manusia harus memanfaatkannya se-efisien dan se-optimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yakni untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.<sup>6</sup> Dari sinilah letak nilai transendental dari ekonomi Islam yang membedakan dengan ekonomi yang lainnya. Dimana dalam ekonomi kapitalis, materi dijadikan sebagai landasan utama dalam menggerakkan sesuatu, dan mereka mengagung-agungkan uang sebagai faktor utama yang akan mengantarkan orang dapat menguasai segalanya.

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya (hubungan horizontal) sama pentingnya dengan

---

<sup>3</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Perss, 2004), h. 264.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Kholam Publishing. Tangerang, 2008), h.147

<sup>5</sup>Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 29.

<sup>6</sup>Zainul Arifin, *op. cit.*, h. 13.

hubungannya dengan Allah (hubungan vertikal), dalam artian bahwa manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya di dasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada al-Qur'an. Prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Oleh sebab itu kepemilikan yang bersifat mutlak (absolute) dalam Islam tidak dibenarkan karena melanggar nilai yang terdapat dalam nilai esensial yang terdapat dalam nilai tauhid yang menjadi nilai dasar dalam ajaran Islam. Kepemilikan manusia di dalam Islam hanya bersifat relative karena segala sesuatunya merupakan titipan Allah yang diberikan kepada manusia sebagai amanah untuk mengelolanya karena manusia merupakan *khalifah fil al-ardi*.<sup>7</sup>

Kepemilikan manusia relatif tersebut, A. M. Saefuddin menjelaskan cara manusia mendapatkan hak kepemilikan tersebut. Adapun caranya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut.
- b. Kepemilikan terbatas sepanjang manusia hidup di dunia, dan apabila ia meninggal, maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah/2: 180
- c. Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum yang dikelola oleh Negara, tidak boleh dimiliki secara perorangan atau kelompok tertentu. Seharusnya harta itu dipergunakan oleh Negara untuk membiayai ekonomi Negara, seperti membantu masyarakat miskin dari segala penjuru.

## 2. Prinsip Khalifah

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi "mandat" kekhalifahan Allah Swt. Posisi manusia sebagai khalifah dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran, seperti dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30. Untuk mendukung tugas kekhalifahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan potensi spiritual. Di samping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu tercapai secara efektif. Menurut M. Umar Chapra, prinsip khilafah berimplikasi pada terjadinya:

- a. Persaudaraan Universal

Prinsip khilafah dapat mewujudkan sikap persatuan dan persaudaraan yang mendasar dari umat manusia. Sebab setiap manusia merupakan khalifah dan kehormatan itu tidak dipegang atau dimonopoli oleh golongan atau orang tertentu. Dengan terjalinnya rasa persaudaraan itu, maka arah pengembangan ekonomi yang dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi, tapi lebih dari itu, secara bersama-sama dan saling mendukung dalam pengembangan ekonomi yang memperkaya kehidupan manusia secara umum.

- b. Sumber-sumber Daya adalah Amanat.

Sumber-sumber daya yang diberikan Allah Swt kepada manusia dalam rangka tugasnya sebagai khalifah, merupakan amanat. Sumber-sumber daya itu bukan milik mutlak manusia yang harus digunakan secara "sewenang-wenang".

- c. Gaya Hidup Sederhana

Manusia sebagai khalifah harus bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Konsekwensinya adalah manusia harus selalu bersikap sederhana, gaya hidupnya tidak mencerminkan kesombongan, keangkuhan dan kemegahan. Manusia tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebih-lebihan dan tidak digunakan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.<sup>9</sup>

Untuk mempertanggungjawabkan kekhalifahan manusia, setidaknya ada empat landasan sebagai rujukannya. Adapun landasannya adalah: *pertama* adalah bahwa kehidupan manusia di dunia ada akhirnya. *Kedua* pembalasan secara sempurna atas perbuatan manusia (kekhalifahan)

<sup>7</sup>Muslimin Kara, *op.cit.*, h. 39.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 39-40.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 41-42

akan terjadi setelah hari akhir. *Ketiga*, bagi yang memperoleh surga dan jauh dari neraka merupakan keuntungan dan kemenangan yang besar. Demikian sebaliknya, bagi yang memperoleh neraka merupakan suatu kerugian dan penyesalan. *Keempat*, kehidupan dunia merupakan kesenangan yang menyesatkan.<sup>10</sup>

### 3. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam perekonomian Islam. bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat al-Qur'an dan sunnah Rasul tapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam, di mana alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para kerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh al-Quran dan bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian itu adalah penegakan keadilan.<sup>11</sup> Hak antara para pekerja (kaum proletar) dan pemilik modal (kaum borjuasi) sama dalam pengertian proporsionalitas, kaum borjuis tidak menggunakan secara sewenang-wenang haknya, yaitu dengan mengorbankan hak orang lain untuk mewujudkan dan merealisasikan yang menjadi haknya, yaitu dengan menghalalkan segala cara, supaya dia tidak mengalami kerugian. Dengan adanya pendiskriminasian terhadap kaum proletar lahir suatu gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kaum proletar atau kaum pekerja yang dipelopori oleh Karl Marx pada masanya.

Menurut Umar Chapra, dilihat dari aspek aqidah Islam al-Qur'an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Hal ini didasarkan pada surat al-Maidah/5: 8. Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan karena tanpa keadilan kebenaran itu akan sulit diwujudkan dan terealisasi dengan baik. Pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang dalam membuat kebijakan tanpa melihat keadaan masyarakat, yaitu dalam artian bisa mensinergiskan antara kepentingan Negara dan kepentingan rakyat. Unsur-unsur manusia di dunia ini lebih sering bisa ditegakkan oleh keadilan yang 'belepotan' dengan dosa dari pada bisa ditegakkan dengan pelanggaran hak yang tanpa dosa sekalipun bersamanya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Allah menegakkan Negara yang adil meskipun Negara itu kafir, dan tidak akan menegakkan Negara yang zalim meskipun itu Negara Islam. juga sering dikatakan bahwa 'dunia tidak akan hancur karena berpadunya keadilan dan kekafiran, sementara dunia akan hancur karena berpadunya Islam dan kezaliman'. Bukan seperti pemerintahan sekarang, yang memegang kekuasaan dan kendali pemerintahan lebih diutamakan tanpa memperdulikan nasib rakyat yang terlunta-lunta karena tidak mampu untuk mendapatkan sesuap nasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 4. Prinsip Tazkiyah atau Keseimbangan

Kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan bathin, individu dan masyarakat. Kesejahteraan manusia telah menjadi tujuan seluruh masyarakat. Bagaimanapun tetap ada suatu perbedaan pendapat mengenai apakah kesejahteraan itu dan bagaimana dia dapat diwujudkan. Sekalipun prasyarat materi bukan menjadi satu-satunya unsur kesejahteraan, orang modern yang berpandangan sekuler, dengan terutama ditekankan pada syarat itu, tampak mempercayai bahwa kesejahteraan dapat terwujud. Tujuan-tujuan ini meliputi: penghapusan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok materi dari semua individu. Tersedia untuk setiap orang setiap kesempatan untuk mendapatkan nafkah yang jujur, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Masyhuri, *op.cit.*, h. 30-31.

<sup>11</sup>Muslimin Kara. *op.cit.*, h. 43.

<sup>12</sup>M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 1.

Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara dari hasil pendapatan Negara. Seperti: zakat, Shadaqah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fa'i* (harta rampasan perang yang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), *'ushr* (zakat tanaman) dan sebagainya. Keseimbangan dalam pendistribusian tersebut tidak secara terperinci disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi dipraktekkan pada masa awal Islam.<sup>13</sup> Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan<sup>14</sup>. Berkaitan dengan dimensi vertikal Islam yang ditunjukkan dengan prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan atau kesejajaran membentuk dimensi kehidupan yang bersifat horizontal.<sup>15</sup>

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di bumi ini dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukkan untuk manusia kesemuanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt.<sup>16</sup> Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Dikatakan sebagai ekonomi insan karena sistem ini dilaksanakan dan diajukan untuk kemakmuran manusia. Sedangkan Umer Chapra menyebutnya dengan ekonomi tauhid. Cerminan watak "ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pakar ekonomi.<sup>17</sup> Dalam ekonomi Islam sumber daya Insani menjadi faktor terpenting, manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada.<sup>18</sup> Semua karakter ekonomi di atas mengacu pada karakter dasar ekonomi Islam sebagai *ummatan wasatan* (umat moderat) sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Israa' 17: 143.

Pengertian *wasathan* dari sejumlah kitab tafsir, lebih dari satu kata konotasi makna, yang pertama maknanya '*tawassuth*'= moderat, kedua bermakna '*Tawaz}un*'= seimbang (balance), ketiga bermakna, *Tasamuh*= terbaik dan alternatif. Keseluruhan tafsir ini mengindikasikan bahwa dalam Islam dan ekonomi Islam tidak ada tapi untuk ekstremitas, kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam member penghargaan yang tinggi kepada orang kaya yang mendapatkan dan mengelola hartanya secara besar, tetapi juga sangat peduli untuk memberdayakan kaum miskin. Politik ekonomi tidak pernah segan untuk menindak orang kaya yang tidak menunaikan hak-hak sosial dari hartanya, dan mengatur fuqara' atau orang miskin yang malas dan selalu meminta belas kasihan orang lain.<sup>19</sup>

Dalam Islam kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga di alokasikan sedemikian rupa. Karakter ekonomi semacam ini merupakan turunan dari karakter umat Islam sebagai umat moderat (*ummatan wasatan*), sebagai umat moderat kini manusia mengemban tugas sebagai syuhada, yakni acuan dari kebenaran dan standar kebaikan bagi umat manusia.

Allah swt telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah Swt telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) harus diawasi masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial dan politik, agama, moral dan hukum

<sup>13</sup> Muslimin Kara, *op.cit.*, h. 40-41.

<sup>14</sup> Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 5.

<sup>15</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *op.cit.*, h. 41.

<sup>16</sup>Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet; 2 Jakarta: Kencana, 2007), h. 9.

<sup>17</sup>Umer Chapra, *op.cit.*, h. 12.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 13.

<sup>19</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet. 3; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.13-14.

yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial di susun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka melaksanakan aturan yang disyariatkan oleh al-Qur'an dan hadis, mengontrol serta mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut.

Berlakunya aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan kekuatan tertinggi (Tuhan), kehidupan sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Uraian di bawah ini hanya akan menjelaskan beberapa aturan “permainan” ekonomi Islam itu tanpa mendalami berbagai implikasi yang timbul daripadanya, karena (hal itu) berada di luar cakupan uraian ini. Beberapa aturan itu di antaranya:

1. Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kedaulatan dan mengatur dan mengolah alam semesta yang telah dititipkan oleh Allah untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya.
2. Allah telah mengatur kehidupan dan perilaku manusia dengan batas-batas tertentu sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.
3. Semua manusia tergantung kepada Allah. Semakin tinggi tingkat ketaatan manusia maka tingkat ketergantungannya kepada Allah akan tinggi dan dia akan semakin dicintai oleh Allah.
4. Status khalifah atau pengembal amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia. Tidak ada istimewa bagi individu atau bangsa tertentu.<sup>20</sup>

Karakteristik yang perlu dipahami dalam ekonomi Islam di antaranya: Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi Islam (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam, membantu para ekonom Muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam, membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas aqidah, akhlak dan asas hukum.<sup>21</sup>

### **Kesenjangan Sosial**

Kesenjangan sosial adalah ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain. Menurut Abad Badruzaman kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Atau dapat juga diartikan suatu keadaan dimana orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang miskin.<sup>22</sup>

Kesenjangan sosial merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok. Fenomena ini dapat terjadi pada negara manapun. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek misalnya dalam aspek keadilanpun bisa terjadi. Antara orang kaya dan miskin sangatlah dibedakan dalam aspek apapun, orang desa yang merantau dikotapun ikut terkena dampak dari hal ini, memang benar kalau dikatakan bahwa “ Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Adanya ketidakpedulian terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangan yang terlalu mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Banyak

---

<sup>20</sup>Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, h. 3-4.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>22</sup>Abad Badruzaman, *Dari Teologi Menuju Aksi Membela yang Lemah, Menggempur Kesenjangan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 284.

orang kaya yang memandang rendah kepada golongan bawah, apalagi jika ia miskin dan juga kotor, jangankan menolong, sekedar melihatpun mereka enggan.<sup>23</sup>

Kemiskinan menjadi faktor terbesar kesenjangan sosial yang menjadi momok dalam kehidupan masyarakat. Saat melihat berita pagi ini tentang kemewahan sebuah penjara para pejabat dan koruptor-koruptor, serta orang-orang memiliki banyak uang. Penjara yang seharusnya menjadi tempat hukuman bagi mereka yang bersalah, serta menjadi tempat untuk merenungi kesalahannya, dijadikan tempat tinggal yang mewah, layaknya sebuah hotel berbintang 5 atau bahkan sebuah apartemen mewah. Hal ini sungguh ironi.

Disaat rakyat negeri ini masih berjuang agar kemiskinan di negeri kita bisa lebih menyusut, para lakon di atas malahan hidup bermewah-mewahan di dalam penjara. Sebagai contoh, seorang pencuri ayam atau jemuran akan mendapatkan hukuman dari masyarakat, yaitu dengan dipukuli beramai-ramai, sementara saat masuk penjara, mereka juga mendapatkan siksaan dari para sipir penjara. Namun, seorang koruptor yang mencuri miliaran rupiah uang negara, bisa hidup bermewah-mewahan serta mendapatkan pelayanan khusus yang cukup istimewa dari pihak penjara tersebut. Apalagi kalau bukan uang yang menjadi hal yang paling utama? Bagi mereka, uang bisa membeli apapun. Bahkan bisa membeli hukum sekalipun. Namun, bagi rakyat kecil yang tidak memiliki uang, mereka hanya bisa pasrah menerima hukuman yang diterimanya. Kesenjangan sosial seperti inilah yang selalu menjadi momok dan juga penyakit di negara kita ini.

### **Faktor - faktor Penyebab Kesenjangan Sosial**

Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis ada dua faktor yang dapat menghambat:

#### 1. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal),

Faktor internal ini terdiri dari: rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan yang rendah (keterampilan), tingkat kesehatan rendah dan adanya hambatan budaya kemiskinan. Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. Dalam penjelasan Lewis, kesenjangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu terkungkung dalam kebudayaan kemiskinan.

#### 2. Faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang (eksternal).

Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural. Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumarjan mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.<sup>24</sup>

Kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia diakibatkan beberapa hal yaitu:

#### 1. Kemiskinan

Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi:

<sup>23</sup>www. <http://cigadogoblog.blogspot.com/2012/06/bab-i-pendahuluan.html>, diakses tanggal 16 Maret 2014.

<sup>24</sup>*Op., ci*, h. 287

- a. Sistem ekonomi uang, buruh upah dan sistem produksi untuk keuntungan
- b. Tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil.
- c. Rendahnya upah buruh
- d. Tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah
- e. Sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral, dan
- f. Kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cenderung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi didobrak, sedangkan status golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cenderung dimiliki oleh masyarakat serta sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga korban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.

## 2. Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, dimana lapangan pekerjaan masih berlebih. Faktor-faktor penyebab pengangguran di Indonesia:

- a. Kurangnya sumber daya manusia pencipta lapangan kerja
- b. Kelebihan penduduk/pencari kerja
- c. Kurangnya jalinan komunikasi antara si pencari kerja dengan pengusaha
- d. Kurangnya pendidikan untuk pewirausaha

Kesenjangan sosial semakin hari semakin memprihatinkan, khususnya di lingkungan perkotaan. Memang benar jika dikatakan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini jelas-jelas mencederai rasa keadilan serta bertolak belakang dengan kebersamaan dan kesetaraan sosial.

### **Dampak yang Ditimbulkan Kesenjangan Sosial**

Kesenjangan sosial semakin hari semakin memprihatinkan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini jelas-jelas mencederai rasa keadilan serta bertolak belakang dengan kebersamaan dan kesetaraan sosial. Selain itu, kesenjangan sosial tidak sesuai dengan pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam kenyataan di sekitar kita, kesenjangan sosial membawa dampak negatif kepada masyarakat. Akibat dari semakin meningkatnya kesenjangan sosial adalah:<sup>25</sup>

#### 1. Melemahnya wirausaha

Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hali ini dikarenakan seorang wirausaha selalu di anggap remeh.

#### 2. Terjadi Kriminalitas

Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam, hal itu disebabkan karena ketiadaan dana yang cukup serta

---

<sup>25</sup> [www. http://: wartawarga.gunadarma.ac.id/.../kesenjangan-sosial-yang-mengakar/](http://wartawarga.gunadarma.ac.id/.../kesenjangan-sosial-yang-mengakar/) - Tembolok, diakses tanggal 16 Maret 2014



kondisi sosial ekonomi yang bermasalah. Oleh sebab itu masyarakat terdorong untuk melakukan berbagai macam tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, berjudi, penodongan.

### 3. Terjadinya Monopoli

Kesenjangan sosial menyebabkan seseorang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebab seseorang yang mempunyai kekuatan baik dari segi ekonomi, hukum, politik, dsb, akan berupaya untuk bisa lebih menguasai bidang masing-masing dengan cara melebarkan sayap kekuasaan mereka. Hal tersebut membuat rakyat miskin semakin tertindas karena mereka tidak punya kemampuan untuk melawannya. Sebagai contoh : maraknya pembangunan mal-mal di kota-kota besar, atau pembangunan swalayan di kota-kota kecil sedikit demi sedikit akan mematikan omset pedagang di pasar tradisional.

### ***Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan Sosial***

Islam sudah memaklumkan perang melawan kemiskinan, memperketak pengepungan dan mengintensifkan pengintaian sebagai antisipasi terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kemiskinan tersebut. Bahaya akidah, perilaku dan moral dan untuk melindungi keharmonisan rumah tangga, kehidupan sosial serta sebagai upaya konkrit melanggengkan kehidupan sosial tersebut dan menciptakan ruh persaudaraan ditengah masyarakat.

Islam mewajibkan kepada setiap individu yang hidup dalam kehidupan sosial agar senantiasa berusaha merealisasikan kehidupan yang layak paling tidak bisa memenuhi kebutuhan primer, seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian di musim dingin dan di musim panas, buku-buku yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki peralatan kerja atau pernikahan manakala sudah mampu untuk itu.<sup>26</sup> kelompok sosialisme-Marxisme menurut mereka bahwa upaya untuk menghapus masalah kemiskinan dan meyakinkan orang-orang miskin tidak akan menjadi kenyataan kecuali dengan menghancurkan kelas-kelas borjuis, merampas harta mereka dan membetasi kepemilikan harta, di manapun sumber penghasilan. Sedangkan kelompok kapitalisme memiliki pandangan bahwa kemiskinan merupakan problem dan kesengsaraan hidup. Tetapi yang bertanggungjawab atas keadaan tersebut atau si miskin itu sendiri, bukan nasib, takdir atau apa saja. Bukan ummat, Negara ataupun orang-orang kaya (kaum borjuis), setiap orang bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Ia memiliki kebebasan untuk memperlakukan harta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak hatinya. Seperti Qarunisme adalah seorang kaum Nabi Musa yang kaya tapi sombong.<sup>27</sup> Dalam Islam, seseorang yang hidup dalam masyarakat Islami sekalipun dia termasuk kafir dzimmi tidak boleh hidup dalam kelaparan, dan tempat tinggal yang layak.<sup>28</sup>

Potret kemiskinan lekat dengan wajah negeri ini. Belunggu kemiskinan seakan hadir secara kontinu tanpa pernah terputus sedikitpun dari waktu ke waktu. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah masih menyisakan lebih dari 35,7 juta jiwa penduduk miskin (data BPS 2002). Impian bangsa Indonesia untuk mewujudkan negeri yang diliputi keadilan dan kesejahteraan secara merata sebagai harapan mulia yang tertutupi oleh perjalanan zaman. Permasalahan kemiskinan turun-temurun yang melanda negeri ini tentu memiliki simpul untuk diuraikan solusinya. Disorientasi visi sistem advokasi warganegara adalah salah satu faktor ketidakberdayaan sebagian masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraannya. Masyarakat miskin merupakan kelompok orang yang jauh dari akses advokasi tersebut. Rata-rata pendidikan mereka sangat minim dan memiliki jaringan terbatas.<sup>29</sup> Adapun solusi Islam dalam rangka merealisasikan cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut:

#### **1. Bekerja (Al-'Amal)**

Manusia dituntut untuk bekerja (berusaha), mengembara di muka bumi dan makan rezeki Allah, sebagaimana dilukiskan dalam al-Quran QS: al-Mulk/67: 15. Arti *al-'amal* disini adalah

<sup>26</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 69.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 6.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 70.

<sup>29</sup><http://sadarzakat.multiply.com>. Diakses 12 Januari 2014.

usaha serius yang dilakukan oleh manusia baik bersifat individu atau kolektif untuk menghasilkan barang atau pelayanan. Usaha atau bekerja merupakan senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Ia adalah penyebab pertama untuk menghasilkan harta benda (kekayaan). Ia adalah unsur pertama dalam rangka memakmurkan bumi yang telah diwakilkan kepada manusia oleh Allah dan diperintahkan untuk dimakmurkan, sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an melalui seruan Nabi Shaleh kepada kaumnya.<sup>30</sup>

Masyarakat islami baik pemerintah maupun rakyat biasa harus menyerahkan segala kemampuan berusaha memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik potensi *basyariyah* (kemanusiaan) ataupun potensi material untuk selalu berupaya menghancurkan "taring-taring" kemiskinan dan menjinakkan keganasannya. Dengan semakin bertambahnya produksi dan meningkatkan pemasukan secara umum akan berdampak positif dan efektif dalam memerangi fenomena kemiskinan. Semua generasi masyarakat Islami harus bekerja sama untuk menutupi setiap celah-celah yang ada untuk menguatkan bangunan sosialnya.<sup>31</sup>

## 2. Zakat

Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat adalah hak yang berhubungan dengan substansi harta itu sendiri. Dan fakir miskin adalah mitra yang juga punya hak dalam hartanya sejumlah kewajiban zakatnya. Masyarakat miskin adalah sarana pertama dari pengeluaran zakat. Dalam hal ini kita juga perlu untuk memberikan batasan, manakah yang termasuk masyarakat fakir dan miskin yang merupakan kelompok yang pertama yang harus disantuni dari dana zakat. Sebenarnya fakir miskin memiliki arti yang sama, yaitu orang melarat dan membutuhkan bantuan. Menurut mayoritas Ulama, orang fakir keadaannya lebih memprihatinkan dibanding dengan orang miskin. Sementara Ulama mendefinisikan fakir dengan orang yang tidak memiliki apa-apa atau harta yang dimiliki tidak mencapai separuh dari kebutuhan diri dan keluarganya. Sedang orang miskin adalah orang yang bisa memenuhi separuh atau lebih dari kebutuhannya, tetapi tidak memenuhi kebutuhannya secara penuh. Orang miskin suka meminta-minta pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang fakir tidak meminta pada orang lain meskipun kebutuhannya cukup mendesak.<sup>32</sup> Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat itu disebutkan dalam Q.S. At-Taubah/9: 60

Kadang-kadang, zakat juga diidentikkan dengan pajak. Padahal antara kedua pungutan itu memiliki perbedaan yang sangat substansial. Dibandingkan dengan pajak modern, zakat memiliki keuntungan tertentu atas pajak. Zakat meneguhkan rasa persaudaraan dengan menjadikan si kaya dan golongan kapitalis bertanggungjawab untuk memelihara si miskin dan orang yang kekurangan. Nilai spiritual dan moral Islam yang ditanamkan oleh Islam akan kehilangan arti pentingnya bila orang tidak melakukan upaya untuk melenyapkan kemiskinan dan mengusahakan keadilan sosial. Zakat benar-benar merupakan suatu konsep revolusioner, karena bagi orang fakir dan miskin bagian tertentu dihipunkan dari semua sektor ekonomi. Demikianlah dengan pungutan 2,5 % atas semua kekayaan yang menganggur seperti emas, dan lain. sepersepuluh atau seperdua puluh atas semua hasil pertanian, seperlima atas semua kekayaan mineral, pajak atas semua modal seluruh Negara telah disisihkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang miskin dan kekurangan.<sup>33</sup>

Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah pemonopolian harta pada segelintir manusia yang beruntung sehingga akhirnya memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri, karena suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli, selalu merintangai pemanfaatan sumber daya ekonomi Negara sepenuhnya. Dan juga zakat adalah musuh yang tidak kenal kompromi terhadap penimbunan dan ia merupakan pembunuh kapitalisme, karena zakat adalah pajak wajib bagi kalangan Muslim yang kaya, yang bertujuan untuk melenyapkan perbedaan pendapatan dan

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 72.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 106.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 184.

<sup>33</sup>Mannan, *op.cit.*, h. 267.

mengembalikan daya beli kepada masyarakat miskin. Menurut ajaran kita suci Al-Qur'an tidak ada salahnya untuk memperoleh uang, tetapi tugas Negara Islam untuk mengusahakan tidak ada seorangpun dari warga Negara tidak memperoleh kebutuhan hidup yang paling sederhana.<sup>34</sup> oleh sebab itu, makanya zakat itu perlu ditangani oleh institusi yang independen, seperti BAZ & LAZ. Karena lembaga zakat mengandung potensi luar biasa untuk mengurangi penderitaan umat manusia yang miskin.

Dalam konsep ekonomi Islam sebenarnya memiliki kekayaan sebagai hak milik umum yang dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan baik. Sumber ekonomi tidak boleh dipegang oleh individu apalagi untuk kepentingannya sendiri tapi dipegang oleh Negara untuk sama-sama dirasakan.<sup>35</sup>

### 3. Jaminan Negara dari Berbagai Sumber yang Diperoleh

Selain dari dana zakat yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang telah dikumpulkan dari masyarakat yang kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat miskin. Adapun dana lain yang dipergunakan oleh Negara kepada masyarakat selain dari zakat; untuk masyarakat modern sekarang adalah; 1) pajak/jizyah; pada masa Rasulullah dana itu disebut jizyah, yaitu pajak yang dikenakan pada kalangan non Muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya, misalnya, harta benda, ibadah keagamaan dan untuk pembebasan dari dinas militer. Dan orang non Muslim yang seperti ini disebut *kafir dzimmi*. 2) Kharaj atau pajak bumi; kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah pemiliknya itu orang yang dibawah umur, orang dewasa, orang bebas atau budak, Muslim ataupun tidak beriman. 3) Barang rampasan perang, pajak atas pertambangan dan harta karun serta 4) Bea Cukai dan pungutan.<sup>36</sup>

Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam mekanisme pasar karena alasan tertentu seperti cacat dan idiot Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara, di antaranya dengan zakat, pemanfaatan harta kepemilikan umum oleh rakyat, subsidi pemerintah, pembagian tanah, dll. Untuk menunjang jalannya aktivitas ekonomi, Islam juga telah menetapkan sejumlah ketentuan hukum.

Pengentasan masalah kemiskinan dapat diminimalisir dengan campur tangan pemerintah. Pengeluaran masyarakat dari kemiskinan dapat diminimalisir dengan pendistribusian dana kepada masyarakat yang terkumpul dari sejumlah jenis pendapatan yang dikumpulkan dari masyarakat. Selain dari campur tangan dari Negara, masyarakat secara individual juga memiliki peran dalam membantu masyarakat miskin dengan memberikan dana yang bersifat sukarela, seperti shadaqah. Sumbangan ini diberikan secara sukarela dan kesadaran individual, karena keprihatinan pada keadaan masyarakat disekitarnya.

## PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ekonomi Islam mampu memberikan alternatif terhadap krisis ekonomi yang telah terbukti membawa efek kesenjangan sosial bagi setiap individual (Faham kapitalisme dan sosialisme). Sistem ekonomi Islam mampu memberikan nilai dan perilaku serta moral dan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dengan tidak melihat perbedaan dalam klasifikasi kehidupan masyarakat. Peran ekonomi Islam dalam menanggulangi tingkat kesenjangan sosial yaitu bahwa semua manusia yang hidup dalam masyarakat dituntut untuk bekerja (berusaha) memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki, kemudian pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus diperbaiki sehingga bisa tersalurkan secara adil, Pengentasan masalah kemiskinan dapat diminimalisir dengan campur tangan pemerintah.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 269.

<sup>35</sup>Yusuf Qardhawai, *op.cit.*, h. 225.

<sup>36</sup>Mannan, *op.cit.*, h. 248.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet Pertama, Jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Badruzaman Abad, *Dari Teologi Menuju Aksi Membela yang Lemah, Menggempur Kesenjangan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Chapra, M. Umer *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Huda, Nurul dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kara, Muslimin. *Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Mannan, M. Abdul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Qardhawi, Yusuf *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf *Teologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme; Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, Bandung: Remadja karya, 1986.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabet, 2003.
- Zaky Al-Kaaf, Abdullah. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2002.

<http://islamlib.com/id/artikel/>